



Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kubu Raya

Muhamad Tisna Nugraha¹, Abdul Pandi², Supiana³, Qiqi Yuliati Zaqiah⁴

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tisnanugraha2014@yahoo.com
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Ulum Kubu Raya, pandiabdul38@gmail.com
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, supiana@uinsgd.ac.id
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, qqzaqiah67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi dan adopsi kebijakan pendidikan yang dilakukan di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin, Kabupaten Kubu Raya, provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilatarbelakangi dari upaya mengungkap eksistensi dari pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan tradisional yang terbukti masih dapat bertahan di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman, serta semakin ketatnya persaingan antara lembaga-lembaga pendidikan modern yang bersifat kekinian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk instrumen pengumpulan data penelitian adalah berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa formulasi dan adopsi kebijakan pendidikan yang berlangsung di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin dilakukan melalui enam tahapan, antara lain: a) Identifikasi masalah kebijakan, b) Penyusunan agenda, c) Perumusan kebijakan, d) Pengesahan kebijakan, e) Implementasi kebijakan, dan f) Evaluasi kebijakan. Selain itu, kebijakan pendidikan yang ada di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin disusun oleh Kyai, Kepala Sekolah, Ustadz dan guru dengan melibatkan komite sekolah.

Kata Kunci: *Formulasi, Adopsi & Kebijakan Pendidikan*

Abstract

The purpose of this study was to describe the formulation and adoption of educational policies carried out at Hidayatul Muhsinin Islamic Boarding School, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. This is an effort to reveal the existence of Islamic boarding schools as a traditional educational institution that has proven to be able to survive in the middle of globalization and the tighter competition era with modern educational institutions. The method applied in this study was field research using a qualitative approach. Furthermore, instruments for collecting data were interviews, documentation, and observation. Based on the results of this study, it indicated that the formulation and adoption of educational policies found at Hidayatul Muhsinin Islamic Boarding School were carried out in six stages, namely a) identifying policy problems, b) formulating agenda, c) formulating policy, d) approving policy, e) implementing policy, and f) evaluating policy. In addition, the education policy in Hidayatul Muhsinin Islamic Boarding School was compiled by *kyais*, the school principal, *ustads*, and teachers by involving the school committee.

Keywords: *Formulation, Adoption, & Educational Policy*

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia. Pesantren juga merupakan

lembaga pendidikan yang masih beroperasi dan terus berproses selaras dengan kemajuan zaman. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pada perkembangan selanjutnya tipologi

pesantren kemudian dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yakni: 1) pesantren salaf; 2) pesantren khalaf; dan 3) pesantren terpadu. Tipologi tersebut bukanya untuk memisahkan satu pesantren dengan pesantren lainnya, namun memberikan tanda terhadap karakteristik yang menjadi ciri khas dari masing-masing pesantren. Terlebih apapun tipologi pondok pesantrennya, lima elemen dasar yang menjadi tradisi pesantren akan tetap ada di tiap-tiap pesantren, yaitu: (1) santri (murid yang belajar mengaji kepada Kyai), (2) pondok pesantren (asrama bagi para santri), (3) masjid ataupun surau, (4) pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning, dan (5) Kyai.

Eksistensi pondok pesantren hingga di abad ke-21 menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga ini terbilang masih kuat dan diminati oleh masyarakat Muslim, meskipun dalam kegiatan pembelajarannya pesantren masih tetap mempertahankan metode pembelajaran klasik seperti *sorogan*, *bandongan* dan *wetonan*. Padahal jika ditinjau dari aspek perkembangan zaman, maka di tengah arus globalisasi serta lahirnya lembaga-lembaga pendidikan modern yang bersifat kekinian, persaingan untuk tetap bertahan di dunia pendidikan terbilang sulit untuk dilakukan.

Lebih lanjut, hal menarik lainnya yang juga muncul adalah bagaimana pondok pesantren dapat bertahan dalam berbagai perubahan situasi dan kondisi yang berlangsung dengan sangat cepat. Padahal pesantren pesantren masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam hal kepemimpinan, pengelolaan lembaga dan sistem pembelajarannya. Oleh sebab itu pengelolaan pendidikan pesantren tentunya menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama berkaitan dengan pengelolaan kebijakan pesantren dalam kegiatan pendidikan. Kebijakan pesantren dalam bidang pendidikan akan terus mengalami perkembangan seiring dengan terjadinya berbagai perubahan di masyarakat dalam lingkup nasional maupun global. Selain itu, perubahan kebijakan pesantren tentunya dapat

terjadi dalam rangka menjawab kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kejadian luar biasa yang sewaktu-waktu dapat terjadi misalnya peperangan, bencana alam ataupun pandemi. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang tepat, tentunya dapat memberikan peluang bagi pelaku pendidikan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, termasuk diantaranya yang dilakukan oleh pondok pesantren Hidayatul Muhsinin yang ada di kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Pondok pesantren Hidayatul Muhsinin merupakan salah satu pondok yang masuk dalam tipologi pondok pesantren terpadu. Karena selain melakukan aktivitas pendidikan pesantren setelah shalat ashar hingga sekitar pukul 21.00 WIB, lembaga ini juga turut menyelenggarakan pendidikan formal di pagi hari pada tingkat dasar dan menengah dalam bentuk Sekolah Dasar Islam (SDI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah menengah Atas (SMA). Selain itu, Pondok pesantren Hidayatul Muhsinin merupakan salah satu pondok pesantren yang terbukti mampu bertahan menghadapi perkembangan zaman dan berbagai perubahan kebijakan pendidikan selama kurun waktu puluhan tahun. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pesantren Hidayatul Muhsinin secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap komponen-komponen yang terdapat pada pondok pesantren, sehingga setiap kebijakan yang disusun dan dikeluarkan pengelola pondok pesantren tidak dapat diabaikan begitu saja. Selain itu, di tengah masyarakat yang tidak sepenuhnya melek aturan dan prosedur terkait kebijakan pendidikan di pondok pesantren. Penelitian ini tentunya dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang formulasi dan adopsi kebijakan pendidikan yang ada di pesantren yang dalam hal ini adalah formulasi kebijakan pendidikan di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan

pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data di lokasi penelitian dalam rangka menghasilkan data deskriptif. Selain itu, penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sehingga tujuan dan gejala-gejala yang tampak dalam penelitian akan terekam secara lebih holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci penelitian.

Selanjutnya, untuk mempertajam hasil penelitian, maka proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah menggunakan analisis data kualitatif. Adapun data yang diolah oleh peneliti merupakan data primer yang berasal dari Kyai, ustadz, guru dan santri. Sedangkan data sekundernya berasal dari staf bagian tata usaha, orangtua santri maupun sumber data pendukung lainnya berupa buku, jurnal dan tulisan lainnya yang ada di media cetak, elektronik maupun sosial media.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Singkat Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin

Pondok pesantren Hidayatul Muhsinin merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh KH. Zainuddin Asy'ari. Pondok Pesantren ini merupakan kelanjutan dari Pondok Pesantren Darul Ma'arif yang berdiri sejak tahun 1988 Masehi di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Namun setelah terjadi kerusuhan etnis di Kalimantan Barat antara Etnis Dayak dengan etnis Madura tahun 1997, maka pondok pesantren ini kemudian dipindahkan ke Kabupaten Kubu Raya dan berganti nama menjadi pondok pesantren Hidayatul Muhsinin. Peralihan nama dari pondok pesantren bukannya tanpa alasan, hal ini didasari oleh permintaan dari pewakif yaitu Habib Anis Al-Hinduan untuk memasukan nama dari Ust. Al-Habib Muhsin Al-Hinduan

ke dalam nama pesantren. Oleh karena itu sejak tahun 1998 Masehi, maka Pondok Pesantren Darul Ma'arif secara resmi beralih nama menjadi Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin.

Selain pendidikan pesantren, Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin juga menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang tingkat dasar hingga Menengah dengan status sekolah dan madrasah swasta. Nama sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud, antara lain adalah Sekolah Dasar Islam (SDI) Hidayatul Muhsinin, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hidayatul Muhsinin, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Hidayatul Muhsinin dengan total jumlah tenaga pendidik formal pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 44 orang dan tenaga pendidik non formal sebanyak 18 orang. Sedangkan untuk jumlah santri di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin adalah sebanyak 274 santri yang terdiri dari 158 santri putra dan 116 santri puteri.

Lebih lanjut, pondok pesantren Hidayatul Muhsinin berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi di lapangan terhadap metode pembelajarannya, menerapkan dua metode Pada pendidikan formal, aktivitas pembelajaran dilakukan dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan yang terdapat di kurikulum 2013 (K.13) yang didalamnya terdapat metode pembelajaran aktif (*active learning*). Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran pesantren, metode yang digunakan dalam metode pembelajaran klasik yakni dengan *sorogan*, *bandongan* dan *wetonan*. Untuk peningkatan keterampilan santri, terdapat beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh pondok pesantren Hidayatul Muhsinin, antara lain: a) Muhadhoroh putra/i, b) Pengajian secara *halaqah* putra/i, c) *Muraja'ah* putra/i, d) *Muthola'ah* putra/i, e) Kultum putra/i, f) Khutbah jumat dan hari raya khusus putra, g) *Qira'at* (seni baca Al-Qur'an, h) Kursus Bahasa Arab, i) Kursus Bahasa Inggris, j) Kursus bahasa Madura halus, k) Sedangkan untuk pendidikan ekstrakurikuler terdapat tiga kegiatan yang dapat diikuti oleh

santri, yaitu a) pencak silat, b) bola Volly, dan c) Hadroh Putra/i

2 Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin

Mustopadidjaja (dalam Hanif Nurcholis, 2005) menyebutkan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan suatu organisasi untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Anderson (dalam Rahman, Murniati & Djailani, 2015) kebijakan adalah arah dari suatu tindakan yang disusun oleh seorang atau sejumlah aktor yang berperan sebagai pembuat kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan. Adapun kebijakan publik menurut Winarno (dalam Pritasari & Kusumasari, 2019: 185) adalah suatu proses penyusunan solusi permasalahan melalui agenda kebijakan yang dilakukan berdasarkan pada tahapan-tahapan perumusan kebijakan sehingga menghasilkan masing-masing alternatif untuk kemudian dipilih yang mana yang terbaik untuk diterapkan.

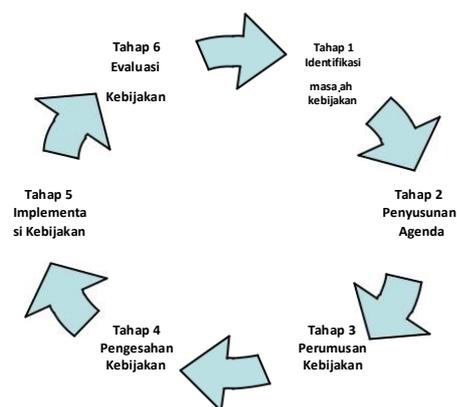
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka formulasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dapat terjadi secara terus menerus seiring dengan munculnya berbagai problematika yang dihadapi dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang ideal tidak dapat lahir dengan sendirinya melainkan harus terlebih dahulu melewati sejumlah tahapan dan proses yang kompleks sebelum akhirnya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan diterima. Hal ini sebagaimana yang terjadi di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin. Ketika suatu permasalahan terjadi dan belum memiliki regulasi yang tepat, maka ketika itu pula formulasi kebijakan dilakukan. Permasalahan sebagaimana dimaksud dibagi ke dalam dua bagian, yakni permasalahan internal, seperti: dalam memberikan keputusan terhadap besaran kenaikan uang iuran sekolah/madrasah atau “uang daftar ulang”, penentuan kenaikan gaji tenaga pendidik, penerimaan santri baru, termasuk juga dalam hal menangani kenakalan santri. Adapun permasalahan eksternal, seperti dalam menyikapi pergantian kurikulum dari

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke kurikulum 2013 (K. 13), sertifikasi tenaga pendidik, persiapan akreditasi sekolah/madrasah, kegiatan pembelajaran saat terjadi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dan lain-lain.

Selanjutnya berdasarkan pada otoritas pembuat kebijakannya, maka penyusunan kebijakan di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin terbagi ke dalam dua bagian, yaitu kebijakan yang dibuat Kyai atau “pimpinan/ketua” pondok pesantren yang dalam hal ini menyangkut seluruh unsur atau komponen yang terdapat di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin, dan kedua, kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah/madrasah yang hanya berlaku dalam lingkup sekolah/madrasah.

Kegiatan perumusan kebijakan di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin, secara garis besar dilakukan melalui enam tahapan, antara lain: a) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), b) Penyusunan agenda (*agenda setting*), c) Perumusan kebijakan (*policy formulation*), d) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*), e) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan f) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Keenam tahapan tersebut dapat dilihat pada siklus gambar sebagai berikut:

Gambar Siklus Tahap Penyusunan Kebijakan



Adapun penjelasan rinci terhadap tahapan-tahapan dari siklus penyusunan kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah merupakan titik awal dari proses penyusunan kebijakan untuk mengenali dan mengidentifikasi secara rinci akar atau latar belakang dari penyebab suatu permasalahan. Dalam proses ini, kecermatan untuk menganalisis suatu permasalahan sangat diperlukan dalam rangka memberikan gambaran penjelasan secara detail dan secara apa adanya situasi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Siti Rahayu, dkk. (2020: 13) menyebutkan bahwa kesalahan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan dapat berakibat pada kekeliruan kebijakan yang telah dibuat. Hal ini menyebabkan kebijakan tersebut menjadi tidak tepat sasaran dan tidak berguna dalam menyelesaikan permasalahan.

Identifikasi permasalahan ini terlebih dahulu dilakukan dengan melihat kewenangan atau posisi dimana suatu permasalahan tersebut terjadi. Jika berada di sekolah/madrasah dan berkaitan dengan peserta didik/santri, semisal kasus kenakalan peserta didik, maka penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas Wali Kelas, Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dan kepala sekolah/madrasah. Namun jika terjadi di jam maupun di dalam pondok pesantren, maka hal ini menjadi kewenangan “Bidang Keamanan”, “Roisul Ma’had”, ustadz dan Kyai.

b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian terhadap isu dan permasalahan yang hendak dikemukakan. Tahapan penyusunan agenda kebijakan adalah langkah kedua yang harus dilakukan setelah identifikasi masalah. Tahapan ini merupakan langkah yang harus dilalui sebelum suatu isu kebijakan dirumuskan. Ada tidak adanya agenda *setting* tentunya menunjukkan apakah suatu kebijakan dalam suatu

organisasi dibuat secara otokratis atau demokratis. Agenda *setting* dapat dikatakan juga sebagai sebuah fase atau proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan pendidikan pondok pesantren. Karena dalam proses inilah kebijakan memiliki ruang untuk dimaknai tentang apa yang disebut sebagai masalah pondok pesantren dan mana yang jadi prioritas dari apa yang menjadi agenda pesantren. Adapun kriteria permasalahan yang bisa dijadikan agenda kebijakan pendidikan pesantren di antaranya: a) Telah mencapai titik kritis atau merupakan sesuatu yang penting, sehingga apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, b) Telah mencapai tingkat partikularitas yang berdampak pada kepentingan orang banyak, c) Mendapat perhatian atau dukungan yang menjangkau dampak yang lebih luas, d) Sulit dijelaskan, tetapi keberadaannya berpengaruh dalam kehidupan. Kegiatan agenda *setting* di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin dilakukan dalam bentuk rapat maupun kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan besar tidaknya suatu permasalahan. Semakin besar suatu permasalahan, maka semakin banyak pula peserta yang dilibatkan dalam kegiatan agenda *setting*. Misalnya untuk kegiatan pelaksanaan *haflatul imtihan* (wisuda santri), maka mulai dari Kyai, Kepala Sekolah hingga ustadz/guru yang ada di lingkungan pondok pesantren Hidayatul Muhsinin akan dilibatkan di dalamnya. Dalam hal ini pihak pesantren atau sekolah juga ada kalanya melibatkan komites sekolah berupa perwakilan orangtua.

Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan kebijakan atau disebut juga formulasi kebijakan adalah tahapan pengusulan dari rumusan kebijakan yang telah disusun melalui inisiasi yang diajukan kepada pimpinan lembaga, yaitu Kyai untuk tingkat pesantren ataupun kepala sekolah/madrasah untuk tingkat sekolah/madrasah. Masalah yang sudah

masuk dalam kegiatan ini dibahas oleh para pembuat kebijakan (*policy maker*) untuk kemudian didefinisikan dan dicari solusi pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut dapat berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang sudah ada termasuk berasal dari masukan para pimpinan semisal, wakil kepala sekolah Bidang Keamanan”, “Roisul Ma’had atau ustadz/guru yang dianggap pakar/ahli di bidangnya. Selain itu dalam hal tertentu adakalanya pihak sekolah ataupun pesantren akan mengundang komite sekolah untuk memberikan masukan. Pada tahap perumusan ini, biasanya masing-masing faksi atau kelompok akan mengajukan alternatif solusi permasalahan termasuk melakukan lobi dan adu argumentasi agar formulasi kebijakan yang diajukan kelompoknya dapat dipilih sebagai kebijakan kolektif yang diambil untuk memecahkan masalah.

d. Adopsi/Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) atau adopsi kebijakan adalah tahapan untuk memberikan otorisasi atau kekuatan hukum dalam bentuk pengesahan/legitimasi atau keputusan kesepakatan yang dibuat secara tertulis. Pengesahan kebijakan ini penting untuk dilakukan agar suatu kebijakan yang telah disepakati mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam pondok pesantren Hidayatul Muhsinin serta dapat diterima sebagai sebuah aturan hukum yang baru. Setelah kebijakan berhasil diformulasikan, kebijakan tersebut akan ditandatangani, di stempel dan dikeluarkan lewat surat resmi. Pada umumnya, wewenang melakukan legitimasi yang mencakup seluruh kepentingan pondok pesantren Hidayatul Muhsinin disahkan atau ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan pondok pesantren. Tanpa adanya surat

ataupun keputusan resmi tersebut, maka kebijakan yang dibuat tidak dianggap syah.

e. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*),

Terbitnya suatu kebijakan pendidikan didasari pada kebutuhan penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi. Pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan merupakan tindakan pelaksanaan sekaligus pembuktian dampak dari suatu kebijakan di lapangan. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan biasanya dilakukan melalui beberapa pendekatan yang salah satunya adalah *top-down*. Pendekatan tersebut bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan harus segera dilaksanakan segenap unsur yang terdapat dalam pondok pesantren Hidayatul Muhsinin. Unsur sebagaimana dimaksud diantaranya adalah segenap pimpinan dan pengurus pondok pesantren, segenap pimpinan dan pengurus sekolah/madrasah, bidang Keamanan, “Roisul Ma’had, dan para santri.

Fokus analisis pada pendekatan ini biasanya terletak pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila seluruh pedoman atau prosedur kebijakan yang telah dilakukan dan tujuan dari suatu kebijakan telah tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Rohman (2016) dalam Ali Ramdhani, dkk (2017:1) bahwa implementasi kebijakan dimaknai sebagai suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian dari sebuah tujuan atau sasaran akhir hasil kegiatan yang dilakukan. Kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat setelah kebijakan dilaksanakan. Sekaligus keberhasilan pelaksanaan kebijakan, dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan atau

implementasi kebijakan tersebut. Selain itu Edward III mengidentifikasi beberapa hal yang diduga kuat berkontribusi besar terhadap implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur organisasi. Keempat aspek ini baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap aspek lainnya dalam pelaksanaan kebijakan (Wahyudi, 2016: 101-105).

f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir dari formulasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Kegiatan ini dilakukan melalui studi program, laporan output kegiatan, ataupun dengan cara mengevaluasi pengaruh atau dampak kebijakan tersebut pada kelompok sasaran dan non sasaran. Kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan pondok pesantren Hidayatul Muhsinin biasanya dilakukan oleh Kyai ataupun kepala Sekolah, komite sekolah dan termasuk oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Namun, proses evaluasi ini baru dapat dilakukan selama batas waktu yang ditentukan. Evaluasi kebijakan sebenarnya tidak hanya dilakukan pada tahap akhir kegiatan saja, melainkan juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan merupakan tahapan pengevaluasian suatu kebijakan yang dilakukan secara komprehensif.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi dan adopsi kebijakan pendidikan di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin dilakukan melalui enam tahapan antara lain: a) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), b) Penyusunan agenda (*agenda setting*), c) Perumusan kebijakan (*policy formulation*), d)

Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*), e) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan f) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Selain itu, kebijakan pendidikan yang dilakukan di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin terbagi dalam dua bagian, yaitu kebijakan yang dibuat oleh Kyai atau “pimpinan/ketua” pondok pesantren yang dalam hal ini berlaku atau mencakup seluruh unsur yang terdapat di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin, dan kedua, kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah/madrasah yang hanya berlaku dalam lingkup sekolah/madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/B/article/view/1>. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara. Vol 11, No. 01.
- Eko Sugiarto. 2017. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Ferry Fadzlul Rahman. 2020. *Introduction to Public Health Management, Organization, And Policy*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Juwandaz & Winin Maulidya Saffanah. 2019. *Kehidupan Etnis Madura Pasca Konflik dengan Etnis Dayak Tahun 1997 di Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat*. <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/maharsi/article/view/580>. Jurnal Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Vol 1, No. 01.
- Luqyana Amanta Pritasari dan Bevaola Kusumasari. 2019. *Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di*

- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pantjar Simatupang. 2003. *Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan*. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/5487>. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 1, No. 1.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sholih Muadi, dkk. 2016. *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. Jurnal Review Politik. Vol.06, No.2.
- Siti Rahayu, Agus Suprpto. 2020. *Kebijakan Kesehatan Berbasis Penelitian di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Taufiqurrohman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama.
- Wahyudi. 2016. *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kotawaringin Kalimantan Barat*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2, No. 2.
- Wen Yusri Rahman, Muniarti & Djailani. 2015. *Analisis Kebijakan Pendidikan Keluarga dalam Memantapkan Perilaku Moral Anak di Kabupaten Aceh Tengah*. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2563>. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 3, No 2.